

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda, kedua negara masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri dalam perumusan perencanaan pembangunan perdesaan di negaranya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Indonesia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Malaysia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan menurut Akta 172 Tentang Perancangan Bandar dan Desa 1976 berupa Pelan Tindakan Desa (PTD).

Penyusunan RPJM Desa di Indonesia, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Analisa data dan pelaporan;
5. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
6. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
7. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
8. Penetapan dan perubahan RPJM Desa.

Penyusunan Pelan Tindakan Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Sistem bestari
2. Kenal pasti masalah dan potensi
3. Visi dan tujuan pembangunan
4. Rekomendasi pembangunan
5. Manajemen pembangunan

6. Pembangunan dan pemantauan

Sesuai dengan perkembangan ilmu yang selalu harus digali dan dirumuskan lagi, begitu pula dengan tahapan perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia ini, setelah diketahui fakta di lapangan, dikaji, dianalisis, maka dalam prosesnya masih harus disempurnakan lagi. Hal ini penting bagi pemerintahan perdesaan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Untuk mencapai perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi pada tahapan proses perencanaan pembangunan perdesaan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi koreksi bersama (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, dan lain-lain) kedepannya dalam mencapai tujuan perdesaan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

Studi ini diharapkan mampu menjadi alternatif masukan bagi tahapan perencanaan pembangunan perdesaan yang sedang berlangsung di Indonesia dan masa yang akan datang, untuk itu dibawah ini disebutkan beberapa elemen yang dapat menggunakan hasil studi ini, yaitu:

1. Kementerian Perdesaan
2. Kementerian Badan Perencanaan Nasional
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten
5. Pemerintah Desa
6. Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang diharapkan mampu meneruskan studi ini dan sebagai sebuah pendekatan alternatif disamping pengetahuan tentang tahapan perencanaan pembangunan perdesaan yang sudah ada sebelumnya

Dikarenakan penulisan ini hanya sebuah pengetahuan awal, maka perlu adanya studi yang lebih dalam mengenai kriteria apa saja yang akan diterapkan dalam tahapan ini dan penentuan sistem penilaian dalam prakteknya. Studi dan penelitian yang mendalam dalam hal ini sangat dibutuhkan demi terciptanya perencanaan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu butuh studi lanjutan mengenai:

- Pendalaman tentang tahapan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Perdesaan
- Alat ukur yang digunakan untuk menghitung keberhasilan kinerja dari perencanaan pembangunan perdesaan
- Verifikasi mengenai rencana tata ruang desa dapat dilakukan atau diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan perdesaan Indonesia maupun sistem perencanaan pembangunan nasional.

